

Savitri Rachmandani
162020100064
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

1. Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo
Totok Wahyu Abadi , Sanadjihitu Sangaji, Luluk Fauziah

kemiskinan merupakan penyakit yang harus diberantas oleh pemerintah di Indonesia, terutama di daerah Sidoarjo. Jumlah kemiskinan di Sidoarjo merupakan salah satu kemiskinan terendah di provinsi Jawa Timur.

Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo lebih bersifat kultural baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Karena di wilayah Sidoarjo memiliki banyak industri-industri/pabrik-pabrik dan sebagian masyarakatnya merupakan wirausaha. Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki program-program penanggulangan kemiskinan, namun program masih belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini masih belum optimal dan tepat sasaran.

2. Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Kejapanan Kecamatan
Gempol Kabupaten Pasuruan
Stella Erdityaningrum Januarti, Isnaini Rodiyah

Dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah memberikan bantuan berupa beras miskin (Raskin) yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam proses pelaksanaan program Raskin pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo tidak melakukan evaluasi terhadap warga atau kecamatan. Hal itu terjadi karena pemerintah Desa Kejapanan tidak memiliki sistem hukum atau sanksi yang berlaku bagi masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya tim dari Pemda Sidoarjo tidak pernah memeriksa program beras dan petugas yang bekerja dalam program ini tidak pernah melakukan pengamatan tentang siapa saja yang berhak menerima bantuan beras miskin (Raskin) dan yang tidak berhak menerima beras miskin (Raskin).

3. WAGE SYSTEM OF FEMALE WORKER BASED ON PUTTING OUT SYSTEM IN
SIDOARJO REGENCY

Luluk Fauziah, Mashudi Mashudi, Lely Ika Mariyati, Ilmi Usrotin Choiriyah

Sistem upah pekerja wanita di Sidoarjo tergantung dengan pemilik perusahaan. Dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo tidak berpengaruh kepada pemilik perusahaan. Kebijakan ketenagakerjaan daerah tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Upah yang diberikan langsung oleh pemilik perusahaan dengan nilai dan jumlah yang diterima tergantung pada benda kerja dan jumlah yang dihasilkan oleh karyawan. Peran pemerintah dan LSM dalam hal ini kurang begitu tanggap dan tidak bertanggung jawab.

Refrensi

1. Abadi, T.W ., Sanadjihitu S., Luluk F. (2015). “Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal MIMBAR, Volume 31, No.2. Desember 2015. Hal: 495-506. <https://scholar.google.co.id>
2. Fauziah, L ., Mashudi , Lely, I.M ., Ilmi, U.C. (2017). “WAGE SYSTEM OF FEMALE WORKER BASED ON PUTTING OUT SYSTEM IN SIDOARJO REGENCY”. Jurnal MIMBAR, Volume 33, No.1. Juni 2017. Hal: 149-157. <https://scholar.google.co.id>
3. Januarti, S.E ., Isnaini R. (2014). “Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan”. Jurnal JKMP, Volume 2, No.1. Maret 2014. Hal: 31-41. <https://scholar.google.co.id>